

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. <https://jdihn.go.id/pencarian/detail/1579124/undang-undang-republik-indonesia-no.-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun->

2014

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274534/perda-kota-semarang-no-5-tahun-2014>

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/27654/perda-kota-semarang-no-12-tahun-2016>

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/27684/perda-kota-semarang-no-14-tahun-2016>

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/176005/perda-kota-semarang-no-3-tahun-2021>

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/277919/perda-kota-semarang-no-8-tahun-2023>

2023

Republik Indonesia, Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
<https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-walikota-semarang-nomor-98-tahun-2021-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-sistem-kerja-satuan-polisi-pamong-praja-kota-semarang-1292>

Republik Indonesia, Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.
<https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-walikota-semarang-nomor-99-tahun-2021-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-sistem-kerja-dinas-sosial-kota-semarang-1312>

BUKU:

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsing, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 15.

Arikunto dan Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47

Irawan Soejito, 1984, Cetakan Kedua, *Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 173

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2016, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 15.

Petrus Soerjowinoto, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Ke-2, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

Rahmawati Sururama and Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*,

Bandung: CV Cendekia Press, hlm. 67-68.

Remaja dan I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, hlm. 26.

Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. hlm. 1621

Widiyanto dan Paulus, 1986, *Gelandangan: Pandangan Ilmuan Sosial*, Cetakan ke-2, Jakarta: LP3ES, hlm. 65.

Zaenal Mukarom, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 159

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

JURNAL:

Abdul Rachmansyah, Hafied Cangara, dan Universitas Hasanuddin, 2023, “Penggunaan Simbol-Simbol Kemiskinan Oleh Para Pengemis Jalanan Di Kota Makassar Suatu Studi Semiotika Fotografi” *Jurnalisa*, Vol. 9 No. 1, hlm. 29–46.

Andy Parawansa, Syahrudin Nawir, dan Baharuddin Badaru, 2022 “Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3 No. 3, hlm. 438–453.

Ani Mardiyati, 2015, “Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective,” *E-Journal Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)*. Kementerian Sosial RI, hlm. 79–108.

Aniyatul Nasofa, Muhadjir Effendy dan Nurhadi, 2016, “Strategi Pendampingan

Anak Jalanan (Studi Kasus di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur)”, *Jurnal Pendidikan Nonformal*, Vol. 11 No. 1, hlm. 5.

Assyifa Mahend Zaradiva dan Wenny Megawati, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang),” *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3, hlm. 854–867.

Fitri Yunita dan Salamuddin, 2018, “Program Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Subulussalam Dalam Mengatasi Pengemis Fitri”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, hlm. 169–91.

Husein Bima Hertanto et al., 2019, “Street Children Behavior in Criminology Perspective (Study of Salatiga City),” *Law Research Review Quarterly*, Vol. 5 No. 2.

Imami Nur Rachmawati, 2007, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1, hlm. 35-40.

Murdiyana dan Mulyana, 2017, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol 10 No. 1, hlm. 73-96.

Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, 2018, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1.

RR. Meiti Asmorowati, 2020, “Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. VI No. 1, hlm. 36.

Sherlock Halmes Lekipiouw, Hendrik Salmon, dan Natanel Lainsampatty, 2021, “Model Pengawasan Dan Tata Hubungan Kewenangan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”, *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 14.

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, 2022, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2, hlm. 325–44.

Yanuar Kusuma Wardani, Yori Herwangi dan Ahmad Sarwadi, 2018, “Peran Struktur Sosial Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 44, No. 1, hlm. 5.

SKRIPSI:

Onny Fransinata Anggara, 2016, “Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan Di Jaringan XYZ” Skripsi: Universitas Airlangga, hlm. 17.

Lalu Muhamad Kurniawan, 2021, “Pemberian Sanksi Disiplin Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 17.

SUMBER LAIN:

Erizka Permatasari, S.H, “Menenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, *Hukum Online.Com*, 2023, Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/>

GreatNusa, "Pengawasan dalam Manajemen: Pengertian, Jenis, dan Fungsinya", *GreatNusa.com*, Online, Internet, 14 Desember 2021, <https://greatnusa.com/artikel/fungsi-pengawasan-kuantitas-dan-kualitas-dalam-manajemen>.

Riska Farasonalia dan Teuku Muhammad Valdy Arief, “Manusia Silver Semakin Marak Di Semarang, 300 Orang Terjaring Razia Selama Pandemi,” *Regional.Kompas.Com*, 2021, Online, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/30/223908278/manusia-silver->

[semakin-marak-di-semarang-300-orang-terjaring-razia-selama?page=all.](#)

Hasil wawancara dengan Tri Redjeki, S.Sos selaku Subkor pemberian layanan bimbingan PMKS lainnya, selaku salah satu anggota Dinas Sosial Kota Semarang, pada hari Senin, 24 Juni 2024.

Hasil wawancara dengan Moch Taufik Apriliawan, S.H., selaku Staff Bidang TibumTranmas Satpol PP Kota Semarang, pada hari Kamis, 4 Juli 2024.

